Model Sikap terhadap Penegakan *Khilafah-Syariah* di Indonesia

Tutut Chusniyah
Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

Abstract.
The Islamist groups want Indonesia to be governed based on Islamic system by establishing khilafa-sharia. Some of them also known for their violent actions, it can be form of terrorism or political intolerant and most of them get supports from people of moslem mainstream. As critic to system justification theory, this paper hypothesize a model of psychological needs (which are consist of the need of uncertainty avoidance and the need of threat management), Islamic ideology (such as: Salafi and Daula Islam ideologies) and group identification which affect political attitude (rivalry of the status quo and thechange democracy to khilafa). By using SEM, this study aims to test the model of the followers represents a beginning attempt to describe and evaluate the effects of various dimensions of psychological need and Islamic ideology. Analysis of data from 384 members of three Islamist groups of JAT (Jamaa Anshoru Tauhid), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) and HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) who participated in the study confirms the fit of the proposed model to the data.

Keywords: *Need of uncertainty avoidance, need of threat management, salafi ideology, daula Islam ideology, group identification, political attitude*

Abstrak.
Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam menginginkan sebuah pemerintahan yang berlandaskan sistem Islam untuk menegakkan khilafah-syariah. Beberapa dari mereka juga dikenal karena beberapa tindakan kekerasan, mulai dari bentuk terorisme atau intoleransi politik, dan sebagian besar dari mereka mendapatkan dukungan dari mainstream orang-orang muslim. Sebagai kritik terhadap teori justifikasi sistem, artikel ini menggambarkan model kebutuhan psikologis (yaitu kebutuhan atas menolak ketidakpastian dan kebutuhan untuk mengelola ancaman), ideologi Islam (yaitu salafi dan Daulah Islam) dan identifikasi kelompok yang mempengaruhi sikap politik (persaingan dengan status quo dan perubahan dari demokrasi ke sistem khilafah). Dengan menggunakan SEM, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji model pengikut yang merepresentasikan sebuah upaya awal untuk menggambarkan dan mengevaluasi dampak dari berbagai dimensi kebutuhan psikologis dan ideologi Islam. Analisis data dari 384 anggota dari tiga kelompok Islamis dari JAT (Jamaah Anshoru Tauhid), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang berpartisipasi dalam studi ini memastikan kesesuaian model yang diusulkan dengan data penelitian.

Kata Kunci: *Kebutuhan menolak ketidakpastian, kebutuhan untuk mengelola ancaman, ideologi salafi, ideologi daulah islam, identifikasi kelompok, sikap politik*

Korespondensi: Tutut Chusniyah. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Domisili: Jl. Gayung Kebonsari IX/17 Surabaya, 60231 (08164296384) Email: tututchusniah@yahoo.com

Mayoritas Muslim di Indonesia adalah Islam moderat, yang memandang Islam dan demokrasi tidak bertentangan sehingga mereka menerima demokrasi dan mendukung sistem negara yang saat ini berlaku (Ashour, 2009: Effendi, 1998; Mujani, 2003). Sedangkan sebagian Muslim lainnya, misalnya kelompok FPI (Front Pembela Islam), FKASW (Forum Komunikasi Ali Sunnah Waljamaah), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan JAT (Jamaah Ansoru Tauhid) berpendapat bahwa pembentukan *khilafah* dan penerapan *syariah* secara langsung sebagai konstitusi negara harus diperjuangkan, karena negara dengan demokrasi bertentangan dengan keyakinan Islam (Effendi, 1998; Jainuri, Maliki & Arifin, 2003). Kelompok Islam ini ingin mengubah demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini berlaku di Indonesia (disebut juga sebagai mengubah *status quo*) dengan sistem *khilafah-syariah*, untuk mendirikan tatanan sosiopolitik Islam dan mengaplikasikan *syariah* Islam dalam semua aspek kehidupan (Moaddel & Karabenick, 2008; Zada, 2003).

Kelompok Muslim yang memiliki sikap politik menolak demokrasi dan memperjuangkan *khilafah-syariah* ini dikenal sebagai kelompok Islam fundamental (AnNaim, 2003; Weinberg & Pedahzur, 2004), kelompok ekstrim kanan, atau kelompok Islam radikal (Sivan, 1990). Sedangkan dalam penelitian ini, yang disebut sebagai kelompok Islamis atau kelompok Islam politik (Mujani, 2003; Pontoh, 2011), adalah kelompok yang mengkonsepkan Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai ideologi politik (untuk selanjutnya disebut sebagai ideologi politik Islam).

Pemahaman terhadap sikap kelompok Islam politik ini penting, tidak saja karena kekuatan komitmen mereka terhadap ideologi politik Islam, tetapi juga karena kegigihannya dalam menyebarluaskan ideologi mereka sehingga mendapatkan dukungan masyarakat luas. Dalam survey yang dilakukan oleh LSI pada tahun 2010, ditemukan bahwalebih dari 60% masyarakat muslim Indonesia mendukung gerakan *khilafah-syariah*. Selain itu sebagian kelompok seringkali mendorong munculnya gerakan radikal dalam masyarakat (Hood, Hill & Williamson, 2005; Weinberg & Pedahzur, 2004; Zada 2003). Gerakan radikal ini dapat muncul dalam berbagai bentuk perilaku intoleran (An-Naim, 2004; Muluk & Chusniyah, 2005; Muluk, Sumaktoyo & Ruth, 2012), makar, dan terorisme (Bin Ali, 2006; Kramer, 2003; Rappoport, 2003), misalnya, keterlibatan kelompok Lasykar Jihad dalam konflik agama di Ambon, Maluku (Hasan, 2008). Kemudian juga aksi kelompok Front Pembela Islam (FPI) dengan melakukan razia dan merusak tempat-tempat maksiat seperti bar, klab-malam, dan hotel (Muluk & Chusniyah, 2005; Purnomo, 2003), serta peristiwa penolakan ajaran Ahmadiyah yang diikuti dengan perusakan fasilitas ibadah dan pendidikannya (Mubarik, 2011). Peristiwa yang mutakhir, paska vonis Ustadz Abu Bakar Baasyir (Amir JAT) sebagai terpidana kasus pelatihan militer kelompok terorisme di Aceh, adalah keterlibatan beberapa anggota JAT dalam bom bunuh diri di Masjid Adz Zikro, kompleks Mapolresta Cirebon pada tahun 2011, bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Solo pada tahun 2011, dan peledakan bom di desa Senolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 Juli 2011 (Kompas.com, 2011).

Penelitian tentang pemikiran politik Islam di Indonesia telah banyak dilakukan, namun studi yang ada didominasi oleh pendekatan historis, antropologis, sosiologis dan politik (Arifin, 2005; Effendi, 1998; Madrid, 2001; Mujani, 2003). Sedangkan penelitian dengan pendekatan psikologi sosial (atau psikologi politik), lebih banyak melihat masalah-masalah kekerasan dengan warna agama (*sacred violance*) dan masalah-masalah yang berhubungan dengan terorisme (Muluk & Chusniyah, 2005; Muluk dkk., 2012). Mengikuti teori motivasi kognisi-sosial/*motivation social-cognition theory* (lihat Jost, Gleser, Kruglanski & Sulloway, 2003a), sikap dan ideologi individu atau kelompok Islam politik dalam menegakkan *khilafah-syariah* disebabkan oleh tingginya kebutuhan untuk menolak ketidakpastian (*need of uncertainty avoidance*) dan kebutuhan untuk mengelola ancaman (*need of threat management)*. Kedua kebutuhan psikologis ini merupakan kekuatan psikologis yang mendasari atau ada di belakang ideologi, sikap dan perilaku politik masyarakat (Jost, 2006; Jost & Hunyady, 2002; Jost dkk, 2003a; Jost, 2007; Thorisdottir, Jost & Kay, 2009).

Kebutuhan untuk menolak ketidakpastian

merupakan kecenderungan individu atau kelompok untuk mencari sesuatu yang dikenal, jelas, dan tidak ambigu. Apapun yang asing dianggap sebagai sumber ancaman, berbahaya dan memunculkan kecemasan akan ditolak (Budner, 1962; Ramakrishna, 2009; Sorentino & Roney, 2000). Sumber dari ketidakpastian ini meliputi segala hal yang asing, perbedaan pendapat, kompleksitas masalah, sesuatu yang baru, ambiguitas dan perubahan sosial (Wilson, 1973). Individu yang memiliki tendensi ini menjadi tidak toleran terhadap ambiguitas, menyukai segala sesuatu yang teratur dan tidak terbuka terhadap pengalaman (Jost dkk, 2003a). Dalam konteks kelompok Islam politik, mereka membagi dunia hanya menjadi dua yaitu Islam dan kafir. Memandang Islam sebagai benar secara absolut dan pandangan selain Islam sebagai salah secara absolut (Sageman, 2004).

Tendensi untuk menolak ketidakpastian dan mencari kepastian yang tinggi pada kelompok Islam politik ini (Ramakrishna, 2009), mendorong mereka untuk memegang ideologi *salafi*. Ideologi salafi merupakan keyakinan bahwa umat Islam harus kembali kepada ajaran asli pada masa Rosul dan sahabat/*salaf* untuk memurnikan Islam (Esposito & Voll, 2001; Frey, 2007; Sageman, 2004). Setiap muslim yang berideologi *salafi* tinggi berpandangan bahwa mereka harus mengamalkan Islam persis seperti yang Rosul ajarkan, tidak boleh ditambah dan dikurangi, apalagi menyesuaikan ajaran Rosul dengan kondisi masa kini. Ajaran Islam pada masa *salaf* ini dipandang sebagai tuntunan yang jelas, tidak ambigu, kategorik dan tidak terpengaruh waktu dan tempat (lihat Akbar, 2002). Ideologi *salafi* sebagai tuntunan yang jelas dan tidak ambigu memberikan kepastian dan stabilitas pada individu (lihat van den Bos, 2009).

Keadaan dunia saat ini juga dianggap mengancam ajaran Islam yang asli dari Rosul Muhammad (Sageman, 2004). Kondisi dunia saat ini yang sangat berubah dilihat sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama, keadaan ini hanya bisa diperbaiki dengan *daulah* Islam (Akbar, 2002). Munculnya kebutuhan untuk mengelola ancaman mendorong kelompok Islam politik untuk memelihara dan melindungi keyakinan agamanya sebagai reaksi terhadap perubahan masyarakat pada saat ini (AnNaim, 2004). Ancaman terhadap nilai, cara hidup dan ajaran agama disebut sebagai ancaman simbolik yang berupa persepsi terhadap ancaman sistem (lihat Jost dkk, 2003a). Kebutuhan untuk mengelola ancaman, mendorong kelompok Islam politik untuk memegang ideologi *daulah* Islam. Menurut ideologi ini, setiap muslim memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan Negara Islam (Esposito & Voll, 2001). Untuk mencapai tujuan ini mereka mencari kekuasaan politik (AnNaim, 2004).

Konsep ideologi yang digunakan dalam penelitian ini bukan dalam pengertian ideologi secara logis dan filosofis, namun lebih pada pemahaman ideologi yang bersifat psikologis. Dalam psikologi, ideologi dimaknai sebagai organisasi opini, sikap, nilai, kepercayaan, cara berfikir tentang orang dan masyarakat (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson & Stanford, 1950), yang diinstitusionalisasikan, disebarluaskan dan diinternalisasikan oleh otoritas eksternal dalam kelompok (Rokeach, 1968) dengan tujuan untuk menyeragamkan pikiran dan tindakan anggota kelompok (Kerlinger, 1984). Ideologi *daulah* Islam dimanfaatkan oleh pemimpin untuk membangun kelompok, agar dapat mengatur tindakan anggota kelompok dalam upaya mencapai tujuan yaitu mengubah demokrasi dan menegakkan *khilafah-syariah* di Indonesia (lihat Almond, Appleby & Sivan, 2003). Kepercayaan dan komitmen anggota terhadap ideologi *daulah* Islam disebarluaskan secara intensif oleh pemimpin dalam kelompok (Sageman, 2004; Ramlet, 2001). Identifikasi kolektif yang intensif ini akan membentuk komitmen terhadap kelompok, integritas serta kohesivitas terhadap ideologinya. Semakin kuat komitmen anggota terhadap ideologi daulah Islam, semakin kuat pula identifikasi anggota terhadap kelompoknya. Komitmen dan identifikasi anggota yang kuat terhadap kelompoknya ini, akan mendorong individu untuk mendukung sikap penegakan *khilafah-syariah* di Indonesia.

Pengaruh kebutuhan psikologis terhadap ideologi politik Islam dan identifikasi kelompok terhadap sikap penegakan *khilafah-syariah* yang digagas dalam penelitian ini merupakan kritik terhadap teori pembenaran sistem (Jost, Banaji & Nosek, 2004; Jost, Glaser, Kruglanski & Sulloway, 2003b; Jost & Hunyady, 2002; Jost & Hunyady,

2005) dan hipotesis rigiditas ideologi (Greenberg & Jonas, 2003).Teori pembenaran sistem/*system justification theory* (dikenal juga sebagai SJT), menjelaskan bahwa sikap politik individu atau kelompok yang mendukung atau mengubah sistem sosial politik yang sedang berlaku berhubungan dengan ideologi politik. Individu atau kelompok yang berideologi politik konservatif (kanan) memiliki sikap politik yang mendukung *status quo*, sedang individu atau kelompok yang berideologi liberal akan bersikap mengubah *status quo.* Teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa kelompok Islam politik yang notabene sangat konservatif justru ingin mengubah *status quo*.

Sementara itu, hipotesis rigiditas ideologi (Greenberg & Jonas, 2003), yang juga merupakan kritik terhadap teori pembenaran sistem, mengatakan bahwa sikap mendukung atau mengubah *status quo* pada ideologi politik liberal (kiri) maupun konservatif (kanan) karena adanya rigiditas ideologi. Rigiditas ideologi ini menyebabkan ekstrimitas pada dua sisi (kiri-kanan). Ekstrim kiri-kanan yang rigid akan mendukung *status quo*. Sebaliknya individu atau kelompok kiri-kanan yang tidak rigid akan mengubah *status quo*. Hipotesis rigiditas ideologi ini juga gagal dalam menjelaskan kenapa kelompok Islam politik (ekstrim kanan yang rigid) tidak mendukung *status quo*, sebaliknya ingin mengubah sistem negara yang saat ini berlaku di Indonesia.

Masalah Penelitian

Dalam fenomena kelompok Islam politik di Indonesia yang ingin menegakkan *khilafah-syariah* dengan mengubah sistem demokrasi, diajukan dugaan bahwa: "Dorongan untuk menegakkan *khilafah-syariah*, disebabkan oleh kebutuhan untuk menolak ketidakpastian, kebutuhan untuk mengelola ancaman, ideologi *salafi,* ideologi *daulah* Islam dan identifikasi kelompok" Rumusan penelitian dikemukakan dalam bentuk pertanyaan, yang akan dijawab dengan penelitian kuantitatif sebagai berikut:

1. Apakah ada kesesuaian antara data penelitian dengan model teoritis kebutuhan untuk menolak ketidakpastian, kebutuhan untuk mengelola ancaman, ideologi salafi, ideologi daulah Islam dan identifikasi kelompok berpengaruh terhadap sikap penegakan *khilafah-syariah* di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh kebutuhan untuk menolak ketidakpastian, kebutuhan untuk mengelola ancaman, ideologi salafi, ideologi daulah Islam dan identifikasi kelompok terhadap sikap penegakan khilafah-syariah di Indonesia?

Sikap terhadap Penegakan Khilafah-Syariah

Menjelaskan perilaku manusia itu merupakan tugas yang sangat sulit, karena perilaku manusia melibatkan faktor yang sangat kompleks. Sebagian besar peneliti menerima bahwa sikap merupakan kunci dalam memahami perilaku manusia dan perubahan dalam sikap akan mempengaruhi perubahan perilaku (Kerlinger, 1984). Asumsi bahwa sikap merupakan prediktor yang kuat terhadap perubahan sikap dan perilaku politik secara empirik didukung oleh penelitian penelitian Durmaz (2007), sikap politik mempengaruhi perilaku memilih pada mahasiswa. Berikut adalah konsep sikap yang dijelaskan oleh Katz (1960):

> *Attitude is the predisposition of the individual to evaluate some symbol, object or aspect of his world in a favorable or unfavorable manner which describe the object of the attitude.*

Mengikuti konsep sikap yang dijelaskan oleh Katz (yang juga dipakai oleh Durmaz, 2007). Penelitian ini melihat sikap politik terhadap penegakan *khilafah-syariah* sebagai kecenderungan individu untuk setuju atau tidak setuju terhadap penegakan *khilafah-syariah*. Sikap penegakan *khilafah-syariah* kelompok Islam politik menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam dengan memperjuangkan pembentukan khilafah dan menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara (Effendi, 1998). Penegakan khilafah-syariah merupakan gerakan penyatuan kembali kekuasaan seluruh dunia Islam, yang menerapkan sistem Islam secara murni dan menyeluruh, membebaskan umat manusia dari dominasi

paham, pemikiran, sistem hukum dan negara kufur (HTI, 2009). Demokrasi dipandang sebagai bukan cara Islam, karena demokrasi didasarkan pada kedaulatan Rakyat padahal negara harus didasarkan pada hukum Tuhan.

Sikap kelompok Islam politik ini, merupakan transformasi dari sistem keyakinan agama ke dalam sikap dan ideologi politik Islam yang mendasari gerakan politik Islam (lihat Weinberg & Pedahzur, 2004). Meskipun dalam kelompok Islam politik beberapa variasi perilaku gerakan penegakan *khilafah-syariah* tidak didasarkan pada ideologi tunggal yang koheren, namun wacana Islam politik sepakat terhadap satu hal yaitu menggugat struktur negara yang telah mendapat legitimasi maupun hegemoni barat dalam dunia Islam (Driessen, 2010).

Perjuangan penegakan *khilafah-syariah* oleh beberapa kelompok Islam politik di Indonesia memiliki beberapa variasi perilaku. Diantaranya ada beberapa kelompok yang memilih menjadi gerakan yang non-kekerasan dalam bentuk partai Islam, seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PBB (Partai Bulan Bintang) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Beberapa kelompok memilih jalur dakwah, seperti HTI, LDII dan *Jama'ah Tabligh* dan yang memilih jalur pendidikan seperti Persis dan *Al Irsyad* (Sila, 2010; Turmudi & Sihbudi, 2005). Sedangkan kelompok yang lain cenderung memunculkan perilaku intoleran (AnNaim, 2004), seperti MMI, JAT dan FPI yang sering melakukan razia terhadap tempat-tempat prostitusi, perjudian dan bar (Purnomo, 2003; Muluk & Chusniyah, 2005), serta keterlibatan kelompok *Lasykar jihad* dalam konflik agama di Ambon, Maluku (Hasan, 2008).

Menurut Fukuyama (1992) setelah perang dingin berakhir, dunia luas menerima konsensus tentang demokrasi-liberal yang sekuler sebagai sistem yang mengatur negara. Negara demokratis dapat berfungsi secara baik dengan memisahkan otoritas agama dari otoritas politik secara menyeluruh (Driessen, 2010). Sistem negara demokrasi-liberal yang sekuler ini mendapat tantangan dari kelompok fundamentalisme agama, seperti *religious right* di Amerika yang menginginkan ajaran kristen sebagai dasar kebijakan pemerintah (Greenberg & Jonas, 2003). Tantangan yang paling kuat terhadap tatanan Barat datang dari Islam politik atau Islamisme (Esposito & Voll, 2001). Dalam hubungan dengan kekuasaan, kelompok Islam politik yang ingin mengubah demokrasi dan menegakkan *khilafah-syariah* sebagai suara Islam yang bereaksi terhadap dominasi budaya barat seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam tradisi marxisme-feminisme menurut Jost, Nosek dan Gosling (2008) didorong oleh ideologi. Dalam hal ini, ideologi yang dimaksud adalah ideologi *salafi* dan ideologi *daulah* Islam.

Ideologi *Salafi*

Istilah *salafi* berasal dari *al salaf al salih* yang merujuk pada generasi awal yang *sholeh*, meliputi tiga kurun waktu (generasi) yaitu sahabat Nabi, Tabi'in Dan Atba' Al Tabi'in. Ideologi *salafi* merupakan keyakinan yang mengajak muslim untuk mengamalkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka dan mendorong umat Islam untuk kembali ke masa *salaf* (Sila, 2010; Ramakrishna, 2009). Ideologi *salafi* bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, melainkan ideologi itu sudah menyejarah (Sila, 2010). Pada abad ke-13, raja-raja Islam senantiasa berusaha menegakkan *syariat* Islam di wilayah kekuasaannya. Keadaan ini memunculkan adanya tarik menarik antara sarak dan adat, yang memuncak dalam bentuk perang paderi di Minangkabau (lihat juga Ramakrishna, 2009).

Kelompok Islam politik memandang bahwa orang Islam saat ini menyimpang dari ajaran asli pada masa Rosul dan sahabat, penyimpangan dari ajaran Islam ini yang menyebabkan kemunduran Islam. Sejarah Islam yang mundur dan gagal, perlu diperbaiki untuk mencapai perbaikan yang sempurna dan memenuhi rencana Tuhan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam (Sageman 2004). Ideologi salafi memandang bahwa Islam merupakan satu-satunya kebenaran absolut yang diturunkan Tuhan untuk mengatur hidup manusia dan mencakup semua aspek kehidupan di dunia. Islam harus dilaksanakan secara murni dan menyeluruh *(kaffah)* seperti ajaran asli pada masa Rosul dan sahabat/salaf (Esposito & Voll, 2001; Frey, 2007; Sageman, 2004). Keinginan untuk memurnikan Islam dan keyakinan bahwa umat Islam harus kembali kepada ajaran asli pada masa Rosul dan sahabat/*salaf* mengharuskan muslim untuk

membangun kembali masyarakat dan negara Islam yang sesungguhnya (Esposito & Voll, 2001). Pelaksanaan Islam menurut idealisme *salafi* hanya mungkin terjadi dalam *daulah* Islam. Individu atau kelompok yang memiliki ideologi *salafi* yang tinggi diduga akan memiliki ideologi *daulah* Islam yang tinggi pula.

Ideologi *Daulah* Islam

Islam merupakan *total civilisation* (peradaban total) yang tidak memisahkan agama dan negara dan menuntut ketaatan total dari pengikutnya (Weinberg & Pedazur, 2004). Bentuk politik sekuler yang memisahkan agama dari negara tidak dapat diterima, kehidupan politik Islam merupakan koherensi dari dunia (*dunya*), agama dan negara (Brown, 1999). Setiap muslim memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan negara Islam (*daulah Islam*). Dalam mencapai tujuan itu kelompok Islam politik mencari dan memenangkan kekuasaan politik (AnNaim, 2004; Desai, 2007), untuk menyokong kekuasaan absolut Tuhan di bumi dan menolak ide kekuasaan manusia (Akbar, 2002). Ideologi *daulah* Islam merupakan keyakinan untuk mengorganisasikan kembali kekuatan negara dalam dunia Islam didasarkan pada hukum Allah (*syariah*) dan penegakan negara Islam. Penegakan negara Islam (*daulah Islam*) diatur berdasar sistem pemerintahan Islam (*nizam Islami*) dan syariah. Menurut ideologi ini, setiap muslim dihadapkan pada tantangan untuk mengadaptasi politik dan pemerintahan agar sesuai dengan tuntunan Islam (Brown, 1999).

Ekspresi ideologi menurut Bar-Tal dan Teichman (2005) tergantung pada konteks pembentukan dalam kehidupan kelompok. Kepercayaan dan komitmen ideologi *daulah* Islam ini dibumikan secara intensif dalam kelompok. Ideologi yang tidak selaras dengan ideologi *daulah* Islam akan dihambat, sedang ideologi yang selaras akan didorong. Internalisasi ideologi merupakan hasil dari proses kelompok kecil yang dilakukan dengan menginternalisasi karakteristik ideologi ke dalam 'diri' dengan membentuk pandangan secara terus menerus (lihat Baumeister, 1999), kemudian oleh individu diekspresikan dalam tindakan kelompok. Bergabung dengan ideologi *daulah* Islam melibatkan pemerolehan identitas sosial yang baru, yang memungkinkan orang yang direkrut dapat secepatnya membedakan dirinya dari kelompok lain dan memberikan identitas sosial yang berbeda dari kategori lain, sehingga meningkatkan harga diri (*self-esteem*) anggota dan memberikan makna (lihat Ramakrishna, 2009). Identitas ini juga memungkinkan adanya komitmen yang tinggi terhadap kelompok. Ideologi *daulah* Islam sebagai karakteristik kelompok, disebarluaskan secara kolektif untuk mempermudah perkembangan identitas sosial dan mengembangkan kelekatan (perasaan) yang kuat terhadap kelompok internal (Lane, 1999). Diduga semakin kuat komitmen anggota terhadap ideologi *daulah* Islam semakin kuat identifikasinya terhadap kelompok.

Kebutuhan untuk Menolak Ketidakpastian

Meski secara umum kita dapat menerima sedikit kejutan, namun sebagian besar dari kita melihat hal yang datangnya tidak terduga sebagai sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman karena memberikan perasaan ketidakpastian tentang aspek hidup kita. Ketidakpastian tentang sikap, keyakinan, perasaan, persepsi dan hubungan dengan orang lain secara umum dihindari, karena ketidakpastian menghasilkan kecemasan (Mandler, 1984; Izard, 1991). Ketidakpastian juga menghilangkan rasa percaya diri, bagaimana berperilaku dan apa yang diharapkan dari lingkungan fisik dan sosial individu (van den Bos, 2009).

Individu yang memiliki kebutuhan dasar untuk merasa pasti tentang dunia tempat mereka hidup, memiliki kebutuhan untuk menghilangkan ketidakpastian dengan mengelolanya secara kognitif sehingga ketidakpastian itu dapat ditoleransi (Sorentino & Roney, 2000). Perilaku individu yang dimotivasi untuk mengurangi ketidakpastian dilakukan dengan menolak segala hal yang tidak jelas, ambigu dan tidak dikenal serta mencari hal-hal yang sudah dikenal, membuat kesimpulan secara prematur, menyukai hal yang sederhana dan stereotipi. Individu yang menolak ketidakpastian ini, resisten terhadap stimulus yang berfluktuasi, memilih dan memelihara satu solusi pada stimulus yang ambigu, menerima sikap yang rigid, hidup yang hitam putih serta mencari

yang pasti-pasti (Furnham & Rebchester, 1995).

Perubahan yang cepat dipersepsi sebagai menyiratkan kekacauan dan tidak bisa diramalkan, sehingga indivudu yang memiliki ketidakpastian yang tinggi tidak terbuka terhadap pengalaman, serta cenderung menyukai dunia yang terstruktur dan teratur (McCrae, 1996). Individu ini juga akan tidak toleran terhadap ambiguitas, sehingga memilih konsepsi dikotomi dan kategorisasi yang kaku tentang norma budaya. Seperti kuat-lemah, bersih-kotor, moral-imoral, menolak persepsi yang ambigu dan enggan berfikir dalam perspektif probabilitas (Jost, 2007; Jost dkk, 2003a; 2003b). Kelompok Islam politik memiliki kebutuhan untuk menolak ketidakpastian yang tinggi (Ramakrishna, 2009). Dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk menolak ketidakpastian, mereka memandang dunia secara dikotomi seperti Islam-Kafir, Allah dan hukumnya, *syari'ah*, bersifat absolut, sebagai lawan dari aturan legal dan politik buatan manusia: aturan Tuhan versus aturan manusia (Akbar, 2002).

Pandangan kategorik ini juga mendapat pengaruh dari pandangan Qutb (dalam Akbar, 2002), bahwa Islam hanya membedakan masyarakat dalam dua tipe yaitu masyarakat Islam dan jahiliyah. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengikuti Islam dalam ajaran, praktik, aturan hidup, institusi, moral dan perilaku. Masyarakat *jahiliyah* adalah masyarakat yang tidak mengikuti Islam. Semua institusi manusia yaitu keyakinan, kebiasaan dan aturan legalnya yang tidak didedikasikan untuk berserah diri dan taat pada Tuhan, termasuk pemerintahan yang penduduknya mayoritas muslim disebut *jahili*, yaitu era masyarakat penyembah berhala sebelum masa Rosul.

Keadaan dunia yang terus berubah juga memberikan perasaan ketidakpastian yang kuat pada kelompok Islam politik, sehingga mereka mendorong masyarakat untuk melaksanakan ajaran Islam secara murni dan sempurna seperti yang diajarkan oleh Rosul dan diteladani oleh sahabatnya terutama empat *khalifah* pengganti Rosul (Brown, 1999; Ramakrishna, 2009). Ajaran Islam pada masa *salaf* yang murni dan tidak berubah memberikan kepastian dan stabilitas pada individu yang memiliki tendensi untuk menolak ketidakpastian (lihat van den Bos, 2009). Dengan memegang ideologi *salafi* ini, maka kebutuhan individu untuk menolak ketidakpastian akan terpuaskan. Karena ideologi *salafi* tidak saja memberi kepastian tentang bagaimana hidup dan berperilaku pada saat ini di dunia, bahkan ideologi *salafi* memberikan kepastian pada muslim akan kehidupan sesudah kematian.

Motivasi individu untuk mendukung ideologi *salafi*, merupakan bagian dari kebutuhan untuk menolak ketidakpastian yang berasal dari perbedaan individual (Thorisdottir, dkk, 2009). Ideologi *salafi* yang dimiliki oleh individu berbeda tingkatannya, tergantung pada kebutuhannya untuk menolak ketidakpastian dan seberapa tingkat kebutuhan untuk menolak ketidakpastian itu dipuaskan atau tidak (Adorno dkk, 1950). Tingkat kebutuhan untuk menolak ketidakpastian yang tinggi, diduga mempertinggi tingkat ideologi *salafi* individu dan sebaliknya tingkat kebutuhan untuk menolak ketidakpastian yang rendah, maka tingkat ideologi salafi individu juga akan rendah.

Kebutuhan untuk Mengelola Ancaman

Kebutuhan untuk mengelola ancaman berhubungan dengan ideologi, agama dan perilaku otoritarian. Beberapa penelitian menunjukkan, selama masa ancaman sosial, ekonomi dan politik orang Amerika menjadi lebih konservatif (Willer, 2004), juga ditemukan lebih rajin ke gereja yang ortodok (McCann, 1999; Sales, 1972), berperilaku otoritarian seperti bergabung dengan klux klux klan (Doty, Paterson & Winter, 1991).

Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan untuk mengelola ancaman muncul dari ancaman simbolik yang berupa ancaman terhadap sistem keyakinan agama, nilai, ideologi, filosofi, moralitas atau pandangan-dunia (*worldview*) kelompok sendiri (Stephan & Renfro, 2002). Kelompok luar yang memiliki perbedaan pandangan-dunia dilihat sebagai ancaman terhadap identitas budaya kelompok sendiri. Sistem norma, kepercayaan dan simbol yang bertentangan dengan sistem nilai-nilai Islam menyebabkan ketakutan bahwa budaya lain akan menyingkirkan sistem agama, nilai, moralitas dan

gaya hidup masyarakat Islam.

Kelompok Islam politik berpandangan bahwa keadaan dunia saat ini mengancam ajaran agama yang berupa ajaran murni Rosul Muhammad. Modernisasi dan nilai-nilai sekuler, yang dominan dalam dunia Barat, merupakan ancaman bagi cara hidup Islam (Fukuyama, 1992). Sistem politik sekuler mengancam sistem Islam, ideologi *daulah* Islam merupakan ideologi yang memprotes dan melawan demokrasi Barat yang sekuler, yang bersifat imperialis-kolonialis dalam tradisi kristen-yahudi (Weinberg & Pedazur, 2004).

Ideologi *daulah* Islam yang dimiliki oleh individu dapat membantu mengurangi perasaan ancaman (lihat Jost dkk, 2003a). Tingkatannya tergantung pada tingkat kebutuhannya dan seberapa tingkat kebutuhan itu dipuaskan atau tidak (lihat Adorno dkk, 1950). Bila tingkat kebutuhan untuk mengelola ancaman tinggi, mempertinggi tingkat ideologi *daulah* Islam individu dan sebaliknya bila tingkat kebutuhan untuk mengelola ancaman rendah, maka tingkat ideologi daulah Islam individu juga akan rendah.

Identifikasi terhadap Kelompok

Kesuksesan kelompok kebutuhan dalam mengelola kondisi yang mengancam dan berbahaya, dipengaruhi oleh identifikasi terhadap kelompok sendiri dan loyalitas terhadap pemimpin (Asch, 1959; Turner, 1999). Identifikasi kelompok berfungsi sebagai lensa kelompok yang membuat orang sensitif terhadap segala sesuatu yang dapat melukai kelompok mereka (Turner, 1999). Sedangkan loyalitas merupakan segala perilaku yang akan meningkatkan kesejahteraan kelompok (Abrams & Brown, 1989). Identifikasi kelompok mendorong orang untuk meletakkan kepentingan kelompok di atas kepentingannya sendiri. Identifikasi dengan kelompok meningkatkan rasa kebersamaan dengan anggota kelompok lain (Brewer & Brown, 1998), meningkatkan tanggung jawab dan motivasi kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok secara keseluruhan (Batson, 1998).

Sedangkan loyalitas didefinisikan sebagai ketaatan terhadap tujuan, simbol, norma dan kepercayaan terhadap kelompok dan anggota kelompok yang diikuti (James & Cropanzano, 1994). Mengikuti konsep loyalitas yang dijelaskan di atas, dalam penelitian ini loyalitas terhadap pemimpin didefinisikan sebagai ketaatan anggota terhadap pemimpin kelompoknya sendiri. Loyalitas terhadap pemimpin menyebabkan anggota tetap bertahan dalam kelompok dan menerima hasil yang sama dengan anggota kelompok lainnya. Semakin kuat identifikasi dan loyalitas individu dengan kelompoknya, semakin peduli mereka terhadap kepentingan kelompok dan semakin menyadari pentingnya melindungi budaya mereka sendiri (Turner, 1999).

Ancaman dari dunia luar terhadap keyakinan keagamaan yang dipersepsi oleh kelompok Islam politik ini, mendorong anggota menyatu dengan kelompok dan ideologi *daulah* Islam sebagai usaha kolektif dalam menghadapi bahaya. Identifikasi kelompok dapat mengurangi perasaan terancam (Costarelli, 2005). Di sini kelompok mendefinisikan realitas sosial untuk mempermudah perkembangan identitas sosial dan mengembangkan kelekatan terhadap kelompok internal (Bar-Tal & Teichman, 2005). Untuk melindungi sistem keyakinan Islam dari kondisi ancaman simbolik sistem demokrasi-liberal sekular, maka identifikasi individu terhadap kelompok akan mendorongnya untuk memiliki sikap positif terhadap penegakan *khilafah-syariah*.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis model struktural yang akan diuji dalam penelitian ini (hipotesis mayor) adalah sikap penegakan khilafah-syariah dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menolak ketidakpastian, kebutuhan untuk mengelola ancaman, ideologi salafi, ideologi daulah Islam dan identifikasi kelompok. Sedangkan hubungan struktur antar variabel penelitian (hipotesis minor), dihipotesiskan sebagai berikut: H1-Makin tinggi kebutuhan psikologis untuk menolak ketidakpastian, makin tinggi pula ideologi salafi individu. H2-Makin tinggi kebutuhan psikologi untuk mengelola ancaman makin tinggi pula ideologi daulah Islam individu. H3-Makin tinggi ideologi salafi, makin tinggi pula ideologi daulah Islam individu. H4-Makin tinggi ideologi daulah Islam, makin tinggi pula identifikasi kelompok. H5-Makin tinggi identifikasi kelompok, makin

tinggi pula sikap penegakan *khilafah-syariah* individu. Pada gambar 1. Di bawah ini dapat dilihat model hubungan struktural antar variabel pada model penegakan khilafah-syariah yang akan diuji dalam penelitian.

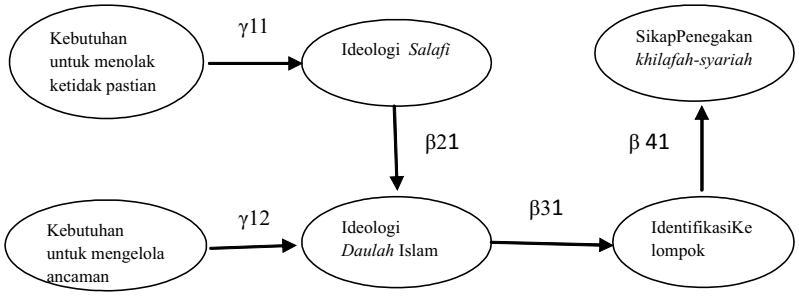

Gambar 1. Model struktural sikap terhadap penegakan khilafah-syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental yang berbentuk survei terhadap anggota kelompok pengusung ide penegakan *khilafah-syariah* yaitu MMI, JAT dan HTI.

Instrumen Penelitian

Instrumen/skala penelitian ini sebelum digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, supaya dapat menggambarkan karakteristik sampel yang sesungguhnya. Validitas skala merupakan ketepatan alat ukur/skala, sedangkan reliabilitas menunjukkan ketepatan dan stabilitas suatu skala dalam mengukur sesuatu (Kerlinger, 2000). Validitas dan reliabilitas skala diperoleh dengan prosedur uji coba dan analisis faktor konfirmatori. Uji coba 9 skala (likert) penelitian dilakukan pada 30 responden yang memiliki kriteria sama dengan subyek penelitian yang sesungguhnya. Berikut definisi operasional dan skala dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel Endogen. Penegakan *khilafah-syariah* (PKS): Preferensi individu untuk setuju atau tidak setuju terhadap pengubahan sistem demokrasi dengan sistem *khilafah-syariah* di Indonesia, yang diukur dengan menggunakan skala penegakan *khilafah-syariah*. Contoh skala:" sistem negara demokrasi di Indonesia harus diubah menjadi sistem *khilafah-syariah*". Skala ini disusun setelah melalui proses *elisitasi*, terdiri dari dua item.

Identifikasi Kelompok (IK): Tingkat kedekatan individu terhadap kelompok dan pemimpinnya, diukur dengan skala identifikasi terhadap kelompok terdiri dari 5 item (Cadinu & Reggiori, 2002) dengan contoh skala: "Menjadi anggota HTI/MMI/JAT mempengaruhi gaya hidup dan cara berfikir saya" dan skala loyalitas terhadap pemimpin dengan contoh skala: "Saya tunduk dan patuh pada aturan dan perintah amir HTI/MMI/JAT". Skala ini disusun setelah melalui proses *elisitasi*, terdiri dari 5 item dan satu item gugur. Ideologi *Salafi* (IS): Tingkat kepercayaan individu untuk ber-Islam secara murni menurut ajaran Rosul dan sahabat, diukur dengan skala ideologi *salafi* yang disusun setelah melalui proses elisitasi dan terdiri dari 6 item dengan contoh skala: "Saya percaya Islam akan kembali jaya bila kita hidup menurut ajaran Islam pada masa Rosul dan sahabat" Ideologi *Daulah* Islam (IDI): Tingkat kepercayaaan individu tentang pentingnya kekuasaan dan pendirian negara Islam, diukur dengan skala ideologi *daulah* Islam yang disusun setelah melalui proses elisitasi dan terdiri dari 4 item dengan contoh skala: "Saya meyakini Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*daulah)*, karena sistem kekuasaan merupakan kunci yang sangat penting dalam Islam" Variabel Exogen. Kebutuhan untuk menolak ketidakpastian (KMK): Tingkat kebutuhan individu terhadap situasi yang tidak pasti dan ambigu, diukur dengan skala keterbukaan terhadap pengalaman dari Big-five (McCrae, 1996). Mengikuti rekomendasi Kenny (1979) dan Jost dkk (2008) untuk memilih tiga sampai empat item perlaten variabel, maka diambil 4 item dengan contoh skala: "Saya suka kejutan dan selalu mencari aktivitas baru untuk dikerjakan", diukur dengan skala order dari Big-

five (McCrae, 1996), terdiri dari 4 item dengan contoh skala: "Saya bekerja sesuai rencana saya" dan diukur dengan skala kategorisasi Islam-kafir yang disusun setelah melalui proses elisitasi, dengan contoh skala: "Islam adalah satu-satunya ajaran untuk mengatur kehidupan manusia, semua ideologi selain Islam adalah kufur" terdiri dari 5 item dan hanya satu item yang gugur. Kebutuhan untuk mengelola ancaman (KMA): kebutuhan individu untuk mengelola ancaman sistem dan ancaman dunia sebagai tempat yang berbahaya, diukur dengan skala ancaman sistem yang disusun setelah melalui proses *elisitasi*, terdiri dari 4 item dengan contoh skala: "Yang paling berbahaya bagi umat Islam di Indonesia ini adalah demokrasi dan sistem Negara" dan diukur dengan skala dunia berbahaya (Duckitt, 2001) terdiri dari 8 item yang gugur 3 item dengan contoh skala: "Kekacauan dan kekerasan dapat terjadi di sekitar kita kapan saja"

Subyek Penelitian

Sampel penelitian ini adalah anggota dan simpatisan kelompok Anshoru Tauhid di kota Malang, Surabaya, Solo, Bima dan Jakarta, anggota dan simpatisan kelompok Majelis Mujahidin Indonesia di kota Yogyakarta, Solo, Sragen, Karanganyar dan Sukoharjo, serta anggota dan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia di kota Surabaya dan Jakarta. Total subyek penelitian yang mendukung model sikap penegakan *khilafah-syariah* ini ada 384 orang, dengan perincian 224 orang (69,6 %) merupakan anggota JAT, MMI dan HTI, sedang pimpinan JAT, MMI dan HTI sebanyak 22 orang (6,8%) serta simpatisan JAT, MMI dan HTI sebanyak 76 orang (23,6%).

Prosedur Penelitian

Kuesioner disebar sebanyak 500 eksemplar, dengan perincian 150 eksemplar disebarkan pada kelompok MMI dan yang diisi secara lengkap dan dapat diolah adalah 147 eksemplar. 150 eksemplar disebarkan pada kelompok JAT, kuesioner yang kembali serta diisi lengkap sebanyak 137 eksemplar. Sedangkan 200 eksemplar disebarkan pada kelompok HTI, kembali 196 namun yang dapat diolah hanya 100 eksemplar karena yang 70 eksemplar memiliki jawaban yang seragam dan kemungkinan diisi oleh satu orang pengurus HTI Surabaya.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis faktor konfirmatori menunjukkan item-item yang disusun untuk mengukur setiap variabel penelitian dapat mengukur secara signifikan konsep teoretik yang melatarbelakangi penyusunan item-item itu. Semua item dari seluruh skala valid, kecuali item PDB3 dari skala persepsi dunia berbahaya dan item IS3 dari skala ideologi *salafi* tidak valid sehingga kedua item itu dibuang dan tidak diikutkan dalam penghitungan selanjutnya. Hasil model analisis faktor konfirmatori tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori

Variabel	Reliabilitas	Validitas	RMSEA	GVI	Kesimpulan
PKS	0,720,45-1,00		0,00	1,00	good fit
KMK	0,870,32-0,74		0,069	0,93	good fit
KMA	0,740,45-0,87		0,13	0,90	marginal fit
IS	0,780,50-0,79		0,00	0,97	good fit
IDI	0,710,53-0,64		0,03	0,98	good fit
KK	0,77 0,32-0,83		0,041	0,92	good fit

Keterangan: PKS=penegakan *khilafah-syariah*; KMK=kebutuhan untuk menolak ketidakpastian; KMA=kebutuhan untuk mengelola ancaman; IS=ideologi *salafi*; IDI=ideologi *daulah* Islam dan KK=identifikasi kelompok

Sedang hasil pengujian struktural model menunjukkan bahwa model terhadap penegakan *khilafah-syariah* yang diajukan sebagai hipotesis dalam penelitian ini *fit,* artinya ada kesesuaian antara model dengan data, dengan memenuhi kualifikasi berupa: P-value≥ 0,05, *Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA) ≤ 0,05, *Goodness of fit index (*GFI) ≥ 0,90 dan T-value ≥ 1,96 (Joreskog dan Sorbom dalam Byrne, 1998). Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap terhadap penegakan *khilafah-syariah* dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menolak ketidakpastian, kebutuhan untuk mengelola ancaman dengan melalui ideologi *salafi,* ideologi *daulah* Islam dan identifikasi kelompok.

terhadap ideologi *daulah* Islam yaitu koefisien Ss 0,73. Kebutuhan untuk menolak ketidakpastian juga berpengaruh secara signifikan terhadap ideologi salafi dengan koefisien Ss 0,23. Variabel yang paling lemah pengaruhnya namun signifikan adalah pengaruh variabel kebutuhan untuk mengelola ancaman terhadap ideologi *daulah* Islam dengan koefisien Ss 0,16.

Pada pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima atau ditolak. Takaran signifikansi statistik dalam penelitian ini, dengan menggunakan t-statistik pada taraf signifikansi 0,05, maka t-statistik (*t-value*) yang dibutuhkan

Tabel 2. *Good of fit* Model Sikap terhadap penegakan *Khilafah-syariah*

χ*df*	RMSEA	p-value	Kesimpulan
23,15	14	0,041	0,05792 Good fit

Semua hubungan struktur dalam model penegakan *khilafah-syariah* yang diajukan pada penetian ini signifikan pada p≥ 0,05, ringkasan hubungan itu dapat dilihat dengan lebih jelas pada gambar 2.

≥ ± 1,96. Dari tabel 3, berdasar t-value maka semua hipotesis diterima yang berarti semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lainnya.

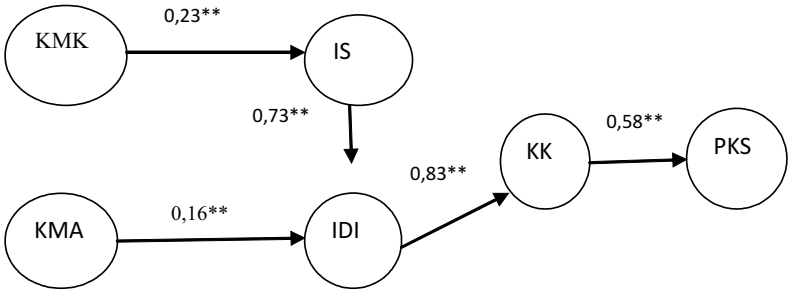

Keterangan: PKS=penegakan *khilafah-syariah*; KMK=kebutuhan untuk menolak ketidakpastian; KMA= kebutuhan untuk mengelola ancaman; IS=ideologi *salafi*; IDI=ideologi *daulah* Islam dan KK=identifikasi kelompok. Signifikan pada **p0,01

Gambar 2 .Kekuatan Hubungan Model Persamaan Struktural

Bila dilihat dari besaran koefisien Ssnya, maka variabel yang berpengaruh langsung terhadap sikap penegakan *khilafah-syariah* adalah variabel identifikasi kelompok pada koefisien Ss 0,58. Sedang variabel yang paling kuat pengaruhnya adalah pengaruh ideologi *daulah* Islam terhadap identifikasi kelompok pada koefisien Ss 0,83. Variabel yang juga kuat pengaruhnya adalah variabel ideologi *salafi*

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan dukungan terhadap model kebutuhan psikologis dari sikap terhadap penegakan *khilafah-syariah* di indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa kebutuhan untuk menolak ketidakpastian dan kebutuhan untuk mengelola ancaman merupakan kekuatan psikologis yang mendasari ideologi dan

Tabel 3.Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Variabel			Estimate	SE	T-hitung	Keterangan
Ideologi *salafi*	<---	Kebutuhan untuk menolak ketidakpastian	0,42	0,09	4,83	Signifikan
Ideologi *daulah* Islam	<---	Kebutuhan untuk mengelola ancaman	0,29	0,08	3,57	Signifikan
Ideologi *daulah* islam	<---	Ideologi *salafi*	0,73	0,06	13,01	Signifikan
Identifikasi kelompok	<---	Ideologi *daulah* Islam	0,46	0,05	9,61	Signifikan
Penegakan *khilafah-syariah*	<---	Identifikasi kelompok	0,59	0,06	9,32	Signifikan

perilaku politik (Jost dkk., 2003a). Konsep dikotomi tentang Islam-kafir yang disertai pandangan bahwa Islam benar secara absolut dan selain Islam sebagai salah secara absolut, menunjukkan kecenderungan individu yang tinggi untuk mendapatkan kepastian dan stabilitas tentang dunia sosialnya (van den Bos, 2009). Kebutuhan untuk menolak ketidakpastian yang tinggi mendorong mereka untuk memurnikan Islam dan hidup seperti cara hidup di masa lalu.

Penemuan ini secara teoretik penting, karena hasil penelitian menolak teori pembenaran sistem (Jost dkk, 2002) dan hipotesis rigiditas ideologi dari Greenberg dan Jonas (2003). Sikap politik untuk mengubah *status quo* bukan karena ideologi politik (liberal-konservatif) dan bukan pula karena rigiditas ideologinya, melainkan karena kuatnya kebutuhan-kebutuhan psikologis, ideologi politik Islam dan identifikasi kelompok.

Individu yang memiliki kebutuhan ini akan memegang ideologi salafi, yang merupakan keyakinan untuk memurnikan agama dan hidup sesuai dengan masa salaf. Mereka ingin ber-Islam secara sempurna seperti ajaran Rosul. Secara psikologis, dapat dijelaskan bahwa saat individu dan kelompok berfikir tentang situasi yang membuatnya tidak pasti, maka ia akan mematuhi norma dan nilai budayanya (van den Bos, 2005). Hal itu disebabkan oleh pandangan mereka untuk hidup secara Islam seperti ajaran Rosul yang asli tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian dan stabilitas, sedangkan kebutuhan untuk mengelola ancaman muncul dari sistem demokrasi-sekular yang memisahkan agama dan negara, sistem dan ideologi sekular ini mengancam kemurnian Islam. Kondisi dunia saat ini dan cara hidup sekuler dipandang sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran agama Nabi Muhammad (Sageman, 2004). Norma, kepercayaan dan simbol demokrasi-sekular merupakan sistem syirik yang dilarang dan mengancam ajaran Islam yang murni, bertentangan dengan nilai-nilai dan identitas Islam dan menyebabkan ketakutan bahwa budaya sekuler akan menyingkirkan gaya hidup Islam. Demokrasi-sekular mengancam agama, nilai, sistem kepercayaan, ideologi, filosofi, moralitas atau pandangan-dunia (*worldview*) umat Islam (lihat Stephan dan Renfro, 2002). Idealisasi tentang mengaplikasikan Islam secara sempurna dan murni seperti masa salafi hanya akan terwujud dalam daulah Islam. Kebutuhan untuk mengelola ancaman mendorong individu dan kelompok untuk berideologi daulah Islam, yang merupakan keyakinan tentang pentingnya mendirikan daulah Islam dalam mengatur masyarakat Islam.

Bagi kelompok Islam politik, masalah orang Islam hanyalah *khilafah* (kekuasaan Islam), memurnikan agama dan mengelola ulang perilaku individu dan masyarakat (komunitas Muslim/*ummah*) yang harus didasarkan pada

Islam (Frey, 2007), dengan mengaplikasikan syariah dalam seluruh aspek kehidupan dengan kekuasaan. Hal itu, dapat dicapai seluruhnya dengan menguasai kekuatan politik (AnNaim, 2004). Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam mengembangkan *khilafah* dan *syariah* melalui kelompok yang relatif homogen dan merupakan entitas yang batasannya berdasar pada komitmen iman dan sistem ideologi salafi dan daulah Islam (lihat Hogg, 2004).

Fenomena perubahan yang digagas oleh sayap-kanan ini, oleh Jost (2003b), disebut sebagai "paradoks konservatif", yaitu perubahan masa kini dengan mengambil idealisme masa lalu. Sebab menurut teori pembenaran sistem (Jost & Hunyady, 2002), individu yang berideologi konservatif akan menolak perubahan. Pendapat Jost ini ditolak oleh Greendberg dan Jonas (2003), yang berpendapat bahwa sekalipun mereka mengidealkan masa lalu, tetapi mereka tetap mendorong adanya perubahan. Sikap kelompok Islam politik di Indonesia dalam mengubah sistem demokrasi menjadi *khilafah-syariah*, merupakan reaksi mereka yang didasarkan pada interpretasi keagamaan tertentu, dengan mengambil visi dari masa lalu untuk memperkuat masa kini dan membangun masa depan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebutuhan yang tinggi untuk menolak ketidakpastian terhadap tingginya ideologi *salafi*. Sedangkan ancaman yang dipersepsi terhadap keyakinan keagamaannya memunculkan mendorong kelompok untuk memegang ideologi daulah Islam. Ideologi *daulah* islam yang kuat pada akhirnya menjadi identitas kelompok, yang memperkuat identifikasi terhadap kelompok Islam politik sehingga memperkuat komitmen mereka untuk meraih tujuan kelompoknya yaitu mengubah demokrasi di Indonesia dengan *khilafa* dan *sharia*. Kelompok ingin mengembalikan kejayaan Muslim dengan kembali kepada ajaran Islam, yang membuat seluruh kerangka kehidupan sosial, ekonomi, dan politik didasarkan pada Islam secara eksklusif dengan sistem *khilafa* dan *sharia*. Kejayaan Islam dapat diraih kembali dengan kembali kepada doktrin Rosul yang asli. Peran ideologi Islam politik yang didorong oleh tingginya kebutuhan untuk menolak ketidakpastian dan mengelola ancaman melalui identifikasi kelompok terhadap sikap penegakan *khilafah-syariah* didiskusikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa kelompok Islam politik memiliki kebutuhan untuk menolak ketidakpastian dan mengelola ancaman yang tinggi. Kedua kebutuhan itu dipuaskan oleh ideologi salafi dan ideologi daulah Islam yang disebarluaskan dalam kelompok sehingga memperkuat identifikasi terhadap kelompok Islam. Hasil penelitian ini, memberikan dua saran praktis dan teoretis. Sebagai saran praktis, mengingat peran kelompok dan pemimpinnya sangat penting, maka penanganan terhadap masalah sikap penegakan *khilafah-syariah* ini disarankan untuk dilakukan pada tataran kelompok. Mengubah sikap ini bukanlah pekerjaan yang sederhana, mengingat di balik sikap itu ada kebutuhan-kebutuhan psikologis dan ideologi politik Islam yang sangat kuat. Namun hal itu tetap bisa diupayakan, dengan cara melakukan komunikasi, diskusi ataupun debat yang menggunakan bahasa Al-Quran dan Hadis antara pemimpin/ulama pendukung syariah dengan pemimpin/ulama pendukung demokrasi. Hasil diskusi itu harus disebarkan kepada masyarakat luas. Meskipun diskusi ini tidak bisa mengubah ideologi mereka, namun wacana ini perlu dipertimbangkan. Seperti diskusi antara sunni dengan syiah yang juga sudah dibukukan. Sedangkan saran teoretik, mengujikan model pada sampel yang lebih luas, baik sampel dari kelompok penegakan *khilafa-syariah* yang lain maupun pada kelompok *mainstream* muslim.

PUSTAKA ACUAN

Abrams, D. & Brown, R. (1989). Self-consciousness and social identity: Self-regulation as a group member. *Social Psychology Quarterly,* 52, 311–318.

Adorno, T., Frenkel-Bruswik, E., Levinson, D., & Stanford, N. (1950).*The authoritarian personality,* New York: Harper.

Akbar, M.J. (2002) *The shade of swords: Jihad and the conflict between islam and christianity*. London: Routledge.

Almond, G.A., Appleby, R.S., & Sivan, E. (2003) *Strong religion: The rise of fundamentalismsaround the world*. Chicago: University of Chicago Press.

AnNaim, A. A. (2003). Islamic fundamentalism and social change: Neither the 'end of history' nor a 'clash of civilizations'. Dalam *The freedom to do Good's will: Religious fundamentalism and social change.* Diedit oleh Harr, Gerrie ter dan Busuttil, J.J. London: Routledge.

Arifin, S. (2004).*Obyektivikasi agama sebagai ideologi gerakan sosial kelompok fundamentalis islam.* Makalah disampaikan pada forum seminar disertasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Malang.

Asch, S. E. (1959). A perspective on social psychology. In S. Koch (Ed.), *Psychology: A study of a science* (Vol. 3, pp. 363–383). New York: McGraw–Hill.

Ashour, O. (2009). Votes and violence: Islamists and the processes of transformation. London. www.icsr.info

Bar-Tal, D. & Teichman, Y. (2005).*Stereotypes and prejudice in conflict: Representations of Arab in Israel Jewis society.* New York: Cambidge University Press.

Batson, C. D. (1998). Altruism and prosocial behavior. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *The handbook of social psychology* (Vol. 2, pp. 282–316). Boston: McGraw–Hill.

Baumeister, R.F. (1999) The nature and structure of the self: An overview. In R.F. Baumeister (ed.) *The Self in Social Psychology*. Hove, UK: Psychology Press.

Bin Ali, M. (2006*). Ideological respon to terrorism and extremism: Case study of jemaah Islamiyah (JI).*Paper dipresentasikan di 1st Convention of Asian Psychological Association, pada tanggal 18-20 agustus 2006 di Kuta, Bali, Indonesia.

Brewer, M. B., & Brown, R. J. (1998).Intergroup relations. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *The handbook of social psychology* (Vol. 2, pp. 554–594). Boston: McGraw–Hill.

Brown, L. Carl (1999).*Religion and state: The Muslim approach to politics.* New York: Columbia University Press.

Budner, S. (1962). Intolerance of ambiguity as a personality variable. *Journal of Personality, 30*, 29–59.

Byrne B. M. (1998). *Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic Concept, Application, and Programming.* New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Cadinu, M. & Reggiori, C. (2002). Discrimination of a low status outgroup: the role of ingroup threat. *European Journal of Social Psychology*, 32, 501-515.

Desai, M. (2007).*Rethinking Islamism: The Ideology of the New Terror.* London: I. B. Tauris & Co Ltd.

Doty, R. M., Peterson, B. E., & Winter, D. G. (1991). Threat and authoritarianism in the United States, 1978–1987. *Journal of Personality and Social Psychology, 61*, 629–640.

Driessen, M. D. P. (2010). Religion, State and Democracy: Analyzing two dimensions of church-state arrangements. *Politics and Religion.*Vol 3, no. 1.

Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. *Advances in Experimental Social Psychology, 33,* 41–113.

Durmaz, H. (2007) Officer attitudes toward organizational change in the Turkish national police. Dissertation prepared for the degree of Doctor of Philosophy. University of North Texas.

Effendy, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

Esposito, J.& Voll, J.(2001). *Makers of Contemporary Islam.* New York: Oxford University Press.
Frey, Rebecca J. (2007). *Global issue: Fundamentalism.* New York: Infobase Publishing.
Fukuyama, F. (1992).*The End of History and the Last Man*. London: Penguin.
Furnham, A., & Ribchester, T. (1995). Tolerance of ambiguity: A review of the concept, its measurement and applications. *Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 14*, 179–200.
Greenberg, J. & Jonas, Eva (2003). Psychological motives and political orientation-the left, right, and the rigid: comment to Jost at. al. (2003). *Psychological Bulletin,* Vol. 129, No. 3, 376-382.
Hasan, N. (2008). Lasykar Jihad: Islam, militansi dan pencarian Identitas di Indonesia paska Orde Baru. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia & KITLV-
Hogg, M.A. (2004). Uncertainty and extremism: Identification with high entitativity groups under conditions of uncertainty. In V. Yzerbyt, C.M. Judd & O. Corneille (Eds.), *The Psychology of group perception: Perceived variability,entitativity, and essentialism,* 401-418. New York: Psychology Press.
Hood JR., R.W., Hill, P. C. and Williamson, W. P. (2005). *The Psychology of Religious Fundamentalism.* New York: The Guilford Press.
HTI (2009). Manifesto HTI untuk Indonesia: Indonesia, khilafah dan penyatuan kembali dunia Islam.
Izard, C. E. (1991). *The psychology of emotion*. New York: Plenum Press.
Jainuri, A., Maliki, Z. & Arifin, S. (2003). *Terorisme dan FundamentalismeAgama.*Malang: Bayu media Publishing.
James, K., & Cropanzano, R. (1994). Dispositional group loyalty and individual action for the benefit of an ingroup: Experimental and correlational evidence. *Organizational Behavior and Human Decision Processes,* 60, 179–205.
Jost, John T, (2006). The End of the End of Ideology.*American Psychologist,* Vol. 61, No. 7, 651-670.
Jost, John T. (2007). Coda-After "The End of the End of Ideology".*American Psychologist.* Vol. 62 (9), 1077-1080.
Jost, John T., Banaji, Mahzarin R., & Nosek, Brian A. (2004). A Decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. *Political Psychology,* Vol.25, No.6, 881-919.
Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F (2003a). Political conservatism as motivated social cognition.*Psychological Bulletin*, 129, 339-375.
Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F (2003b). Exception that prove the rule-using theory of motivated social cognition to account for ideological incongruities and Political anomalies: Reply to Greenberg and Jonas (2003). *Psychological Bulletin*, 129, 383-393.
Jost, J. T. & Hunyady, o.(2005). Antecedents and concequences of system justifying ideologies.*European Review of Social Psychology*, 13, 111-153.
Jost, J. T., & Hunyady, o. (2002). The psychology of system justification and the palliative function of ideology. *European Review of Social Psychology*, 13, 111-153.
Jost, John T., Nosek, Brian A. & Gosling, Samuel D. (2008). Ideology: Its resurgence in social, personality, and political psychology. *Current Directions in Psychological Science*, Vol 14(5), 206-265.
Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes.*Public Opinion Quarterly, 24,* 163-204.
Kenny, D. A. (1979). Correlation and causality. New York: John Willey.
Kerlinger, F. N. (1984). Liberalism and conservatism: The nature and structure of social attitudes. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Kerlinger, F. N. (2000). *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Penerjemah Simatupang L. R. & Kusmanto, H. J., Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Kompas (1 April 2002). Serangan Bom di Indonesia dan Filipina.*http://***www.kompas,com***/ *kompas-cetak/0204/01/nasional/radio6.htm.*Kompas.com (2011a). Presiden: Pelaku Anggota Jaringan Teroris Cirebon. Hari W, L. pada 29 desember 2011.
Kompas.com (2011b). Pelaku Bom Bunuh Diri Terkait DPO Jaringan Cirebon. Santoso, F.dan Adhi Ksp, R.http://nasional.kompas.com. pada 29 desember 2011.

Kompas.com (2011c). Bom di Pondok Pesantren: JAT Bicara soal Ponpes Umar Bin Khattab. Margianto,H.http://nasional.kompas.com. Diunduh pada 29 desember 2011.

Kompas.com (2011d). Vonis Ba'asyir: Pengadilan Gagal Ungkap Motif Ba'asyir Liu, H. dan Inggried. http://nasional.kompas.com. Diunduh pada 29 Desember 2011.

Kramer, M. (2003). The moral logic of Hizballah. *In Origin of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, State of Mind.* Edited byReich, W.; Washington. D. C.: The Woodrow Wilson Center Press.Lane, S. T. M. (1999). Ideology and consciuosness. *Theory & Psychology*, Vol. 9(3), 367-378.

LSI.(2010). Laporan Lembaga Survey Indonesia yang disampaikan dalam simposium nasional:"Memutus mata rantai radikalisme dan terorisme" pada 27-28 Juli 2010, di hotel Le Meridian, Jakarta.

Madrid, R. (2001). *Fundamentalis and democracy: The politic culture of Indonesian Islamist students.* Dissertation.UMI.American University.

Mandler, G. (1984). *Mind and body.* New York: W.W. Norton.

McCann, S. J. H. (1999). Threatening times and fluctuations in American church memberships. *Personality and social psychology bulletin,* 25, 325-336.

McCrae, R. R. (1996). Social consequences of experiential openness. *Psychological Bulletin, 120,* 323–337.

Moaddel, M.& Karabenick, S.A.(2008). Religious Fundamentalism among Young Muslims in Egypt and Saudi Arabia. *Social Forces,* Volume 86, Number 4.

Mujani, Saiful (2003). *Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post Suharto Indonesia*. A Dissertation submitted in partial fulfillment of requirement for the degree of doctor of philosophy in political science at the Ohio State University.

Mubarik, F. (2011). Anak-anak menjadi perantau Ahmadiyah. *IndoProgress: Jurnal pergerakan progresif*. Jogjakarta: Resist book.

Muluk, H. & Chusniyah, T. (2005). *Ideology, Mortality Salience, and 'Sacred Violence':Structural Equation Models.* Presented in 6th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology, July, 25-28, Wellington-NewZealand.

Muluk, H., Sumaktoyo, N. & Ruth, D. (2012). Jihad as justification: National-survey evidence of belief in violent jihad as mediating factor for sacred violance among muslim in Indonesia. Asian journal of social psychology. sedang dicetak.

Pontoh, C. H. (2011). Kekerasan negara, dari orde baru hingga kini. *IndoProgress: Jurnal pergerakan progresif*. Jogjakarta: Resist book.

Purnomo, A. (2004). *FPI Disalahfahami.* Jakarta: Mediatama Indonesia.

Ramakrishna, K. (2009). Radical pathways: Understanding muslim radicalization in Indonesia. London: Praeger Security International.

Ramleth, A. H. (2001). *Manufacturing A New Islamic Order: Islamic Discourse in Ujung Pandang (Makassar), South Sulawesi, Indonesia*. A Dissertation submitted in partial fulfillment of requirement for the degree of doctor of philosophy in anthropology at University of Washington.

Rappoport, D. (1998). Sacred terror: a contemporary example from Islam. *Origin of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, State of Mind.* Edited byReich, W. ;Washington. D. C.: The Woodrow Wilson Center Press.

Sageman, M. (2004).*Understanding Terror Network*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Sales, S. M. (1973). Threat as a factor in authoritarianism: An analysis of archival data. *Journal of Personality and Social Psychology, 28,* 44–57.

Sheridan, M. (2006).*Sunday times*. 30 July.

Sila, M. A. (2010). *Akar ideologi dan teologi dari fundamentalisme, radikalisme dan terorisme.* Paper yang disampaikan dalam simposium nasional:"Memutus mata rantai radikalisme dan terorisme" pada 27-28 Juli 2010, di hotel Le Meridian, Jakarta.

Sivan, E. (1990) *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics* (2nd edn.) New Haven, CT: Yale University Press.

Sorrentino, R. M., & Roney, C. J. R. (2000). *The uncertain mind: Individual differences in facing the unknown*. Philadelphia: Psychology Press/Taylor & Francis.

Thorisdottir, Hulda, Jost, John T. and Kay, Aaron C. (2009). On the Social and Psychological Bases of Ideology and System Justification. Dalam *Social and Psychological Bases of Ideology and System Justification.* Diedit oleh Edited by John T. Jost, Aaron C. Kay, and Hulda Thorisdottir. New York: Oxford University Press.

Turmudi, E. dan Sihbudi, R. (edit) (2005).*Islam dan radikalisme di Indonesia*.Jakarta. LIPI Press.

Turner, J. C. (1999). Some current issues in research on social identity and self-categorization theories. In N. Ellemers, R. Spears, & B. Doosje (Eds.), Social identity: Context, commitment, content (pp. 6–34). Oxford, UK: Blackwell.

Van den Boss, K. (2009). The Social psychology of uncertainty management and system justification. Dalam *Social and Psychological Bases of Ideology and System Justification.* Diedit oleh Edited by John T. Jost, Aaron C. Kay, and Hulda Thorisdottir. New York: Oxford University Press.

Van den Bos, K., Poortvliet, P. M., Maas, M., Miedema, J., & van den Ham, E. (2005). An enquiry concerning the principles of cultural norms and values: The impact of uncertainty and mortality salience on reactions to violations and bolstering of cultural worldviews. *Journal of experimental social psychology,* 42, 910133.

Weinberg, L. & Pedahzur, A. Ed. (2004). *Religious fundamentalism and political extremism*. London: Frank Cass Publishers.

Willer, R. (2004).The effects of goverment-issued terror warnings on presidential approval ratings. *Current research in social psychology*, number 10.

Wilson, G. D. (Ed.). (1973). *The psychology of conservatism.* London: Academic Press.

Zada, K. (2003). Politik Islam radikal: Survei wacana dan gerakan Islam di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan HAM,* 3, 1, Januari-April.